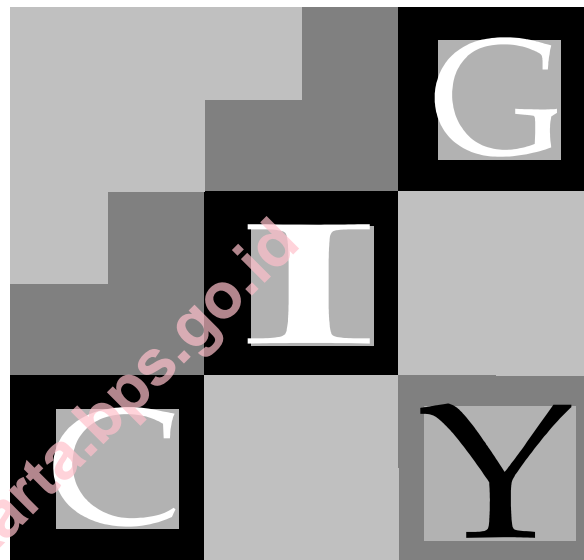




Katalog BPS : 9207.34

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PENGGUNAAN

*Gross Regional Domestic Product
Daerah Istimewa Yogyakarta Province
by Expenditure*



2001 - 2005

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENURUT PENGGUNAAN**

***GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
OF D.I. YOGYAKARTA PROVINCE
BY EXPENDITURE***

2001-2005

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi/ *Publication Number* : 34550.06

Naskah/ *Editor* :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Regional Accounts and Statistical Analysis Division

Gambar Kulit/ *Art Designer* :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Regional Accounts and Statistical Analysis Division

Diterbitkan oleh/ *Published by* :
Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta/
BPS-Statistics of D.I. Yogyakarta Province

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut Penggunaan tahun 2001-2005 Propinsi D.I. Yogyakarta merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari publikasi terdahulu. Publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan konsep/definisi Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan. Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disajikan secara ringkas tinjauan ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2001-2005.

Melalui publikasi ini dapat diperoleh gambaran tentang penggunaan Produk Domestik Regional Bruto selama periode tahun 2001-2005 baik dalam penilaian atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2001. Data ini berguna sebagai bahan analisis, evaluasi dan perencanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Saran dan kritik perbaikan tetap diharapkan dari para pembaca dan pengguna data. Akhirnya kepada semua pihak terutama sumber data yang telah membantu mulai dari persiapan hingga dapat diterbitkannya publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, Oktober 2006

Badan Pusat Statistik
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

R. Lukito Praptoprioko, MA
NIP. 340005028

PREFACE

Publication of Gross Regional Domestic Product (GRDP) by expenditure in D.I. Yogyakarta Province for 2001-2005 periods is a continuation and completion of the previous publication. This publication is accompanied by the explanation about concepts/definitions of GRDP by expenditure. In order to get the progress of the economic development, a brief analysis of D.I. Yogyakarta economic for the last five years was also presented.

Based on this publication we can obtain the progress of GRDP by expenditure, both at current market price and 2001 constant market price. These data are useful for the element of analysis, object of evaluation and the development planning especially in economic sector.

Suggestions and critics are welcome. Finally to all parties especially to the data sources and those who helped from the preparation until the publication can be published, we would like to say our sincere thanks.

Yogyakarta, October 2006

*BPS Statistics of D.I. Yogyakarta
Province*

R. Lukito Praptoprijoko, MA
Head

DAFTAR ISI

CONTENT

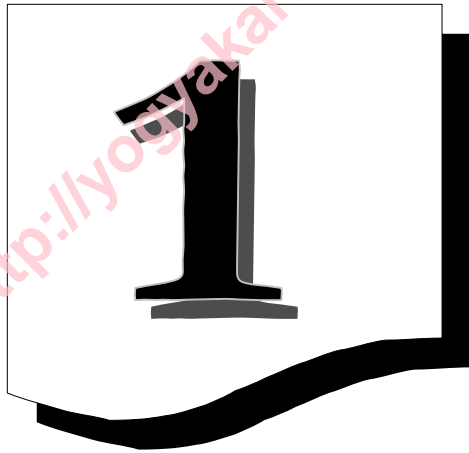
	Halaman Pages
KATA PENGANTAR.....	i
PREFACE.....	ii
DAFTAR ISI/ CONTENTS.....	iii
DAFTAR TABEL/ LIST OF TABLES.....	iv
I. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION.....	1
II. RUANG LINGKUP DAN DEFINISI/ COVERAGE AND DEFINITION.....	3
2.1 Konsumsi Rumah tangga/ <i>Private Consumption</i>	3
2.2 Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)/ <i>Private Non-profit Institution Consumption Expenditure</i>	5
2.3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan/ <i>Government and Defense Consumption</i>	6
2.4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	9
2.5 Perubahan Stok/ <i>Change in Stock</i>	12
2.6 Ekspor dan Impor/ <i>Export and Import</i>	12
III. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA/ ESTIMATION METHODS AND DATA SOURCES	
3.1 Konsumsi Rumah tangga/ <i>Private Consumption</i>	14
3.2 Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)/ <i>Private Non-profit Institution Consumption Expenditure</i>	15
3.3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan/ <i>Government and Defense Consumption</i> ..	16
3.4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	17
3.5 Perubahan Stok/ <i>Change in Stock</i>	17
3.6 Ekspor dan Impor/ <i>Export and Import</i>	19
IV. TINJAUAN PDRB PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DARI PENDEKATAN PENGGUNAAN / REVIEW OF GRDP IN D.I. YOGYAKARTA BY EXPENDITURE	
4.1 Struktur PDRB Penggunaan/ <i>Structure of GRDP by Expenditure</i>	22
4.2 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan / <i>Economic Growth on the Demand Side</i>	32
LAMPIRAN/ APPENDICES	35

DAFTAR TABEL

LIST OF TABLES

	Halaman Pages
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005 (Jutaan Rupiah).....	35
<i>Table 1. Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Expenditure in D.I. Yogyakarta Province, 2001-2005 (Million Rupiah).....</i>	35
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005 (Jutaan Rupiah).....	36
<i>Table 2. Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Prices by Expenditure in D.I. Yogyakarta Province, 2001-2005 (Million Rupiah).....</i>	36
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005.....	37
<i>Table 3. Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Expenditure in Yogyakarta Special Region Province, 2001-2005.....</i>	37
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005.....	38
<i>Table 4. Percentage Distribution of Gross Regional Domestic product at Constant 2000 Market Prices by expenditure in Yogyakarta Special Region Province, 2001-2005.....</i>	38
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005.....	39
<i>Table 5. Growth Rates of Gross Regional Domestic Product at Current Prices by Expenditure in D.I. Yogyakarta Province, 2001-2005.....</i>	39
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2001-2005.....	40
<i>Table 6. Growth Indices of Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Prices by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005.....</i>	40
Tabel 7. Inflasi (Harga Produsen) Tahun 2001-2005.....	41
<i>Table 7. Inflation Rate (Producer Price), 2001-2005.....</i>	41

BAB



<http://lyonjakarta.pps.go.id>

I. PENDAHULUAN

I. INTRODUCTION

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan dengan metode langsung meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran/penggunaan. Dari ketiga macam pendekatan tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) di Propinsi D.I. Yogyakarta telah menerbitkan secara rutin PDRB pendekatan produksi. Di samping itu, akhir-akhir ini diterbitkan juga PDRB pendekatan penggunaan.

PDRB yang disajikan menurut penggunaan/ pengeluaran dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di wilayah itu sendiri maupun yang berasal dari impor atau wilayah lain.

Pada garis besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi bila dilihat dari segi penggunaannya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang disebut konsumsi akhir (*final consumption*).

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam proses produksi sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir akan habis untuk memenuhi kebutuhan

Computation of Gross Regional Domestic Product (GRDP) which is done by direct method covers three kinds of approach. They are production approach, income approach, and expenditure approach. From those kinds of approach, BPS-Statistics of D.I. Yogyakarta Province had annually publicated GRDP based on production approach. Beside that, also it had been publicized the regional income by expenditure approach lately.

GRDP by expenditure shows the composition of goods and services both produced from the region and imported from other region.

Generally, goods and services produced by many economic sectors, if observed by expenditure can be divided into:

1. *Goods and services used in production process, which is called as intermediate consumption.*
2. *Goods and services use to complete the society consumption, which is called as final consumption.*

Goods and service belong to intermediate consumption will finished in production process, whereas goods and services belong to final consumption will finished in society consumption. The consumption covers:

konsumsi masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi :

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga.
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba).
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah.
4. Pembentukan modal tetap bruto.
5. Perubahan stok.
6. Ekspor dan impor.

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir tidak saja berasal dari produksi domestik tetapi juga berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Secara ringkas keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y + M = C + IF + IS + E$$

Dimana :

- Y = Produk Domestik
M = Impor
C = Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah, dan Lembaga Swasta Nirlaba
IF = Pembentukan modal tetap bruto
IS = Perubahan stok
E = Ekspor

Dalam hal ini yang dihitung adalah produk domestik (pendapatan suatu daerah), maka persamaan di atas dapat diturunkan menjadi :

$$Y = C + IF + IS + E - M$$

Oleh karena itu, dalam penyajian PDRB menurut penggunaan harus dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

consumption covers:

1. *Private consumption expenditure.*
2. *Private non profit institution consumption expenditure.*
3. *Government consumption expenditure.*
4. *Gross domestic fixed capital formation*
5. *Change in stock*
6. *Export and Import*

Goods and services used to complete the final demand do not come from import, from abroad and other regions. Shortly, the situation can be stated as follows :

$$Y + M = C + IF + IS + E$$

Explanation :

- Y = *Domestic product*
M = *Import*
C = *Consumption of private, government and private non profit institution*
IF = *Gross domestic fixed capital formation*
IS = *Change in stock*
E = *Export*

In this case it calculated the domestic product (income generated in the region), so that the above equalities can be derived into:

$$Y = C + IF + IS + E - M$$

That's why in serving the GRDP by expenditure, one must calculate components of final demand.

BAB

2

<http://yosjakarta.blogspot.com>

II. RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

II. COVERAGE AND DEFINITION

2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran barang dan jasa (baik barang tahan lama maupun barang tak tahan lama) dikurangi hasil penjualan netto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas/tak terpakai yang dilakukan oleh suatu rumah tangga yang berdomisili di suatu propinsi, pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Selain pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar, dan jasa-jasa, termasuk juga barang yang tidak ada duanya (tidak diproduksi kembali) seperti karya seni, barang antik dan lain-lain. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti mobil, motor, furniture, radio, kulkas, televisi, dan lain-lain.

Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan, dan jasa-jasa lainnya termasuk di dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon, dan lain-lain, merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dalam hal barang yang mempunyai kegunaan ganda, maka pembelian dan biaya operasional barang tersebut harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan. Misalnya mobil,

2.1 *Private Consumption*

Private consumption covers all expenditure for consumption goods (durable and non durable) and services deducted by net sales (sales minus purchases) of second hand/waste goods spent by household domiciled in a province, in a certain period (usually one year). Beside expenditures for foods, drinks, cloths, fuel and services, it also expenditure for underproduction goods such as art thing, antique thing and so on. It includes durable goods such as car, motor, furniture, radio, refrigerator, TV, and so on.

Expenditure for keeping health, education, recreation, transportation and other service are included of the private consumption. Buying a house is not private consumption, but expenditure for the dwelling as house rent, light reparation, electric bill, running water, telephone, and so on is treated as private consumption expenditure.

For goods having multi purposes, namely for consumption and also for supporting household business activity, such as : car and other durable goods, the purchasing value and operational cost of goods must be allocated proportionally

selain digunakan untuk keperluan rumah tangga juga dipakai sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga tersebut misalnya dipakai sebagai alat angkutan para pegawai dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga. Sama halnya dengan pengeluaran terhadap sewa, bahan bakar, listrik, air, dan jasa lainnya yang dipakai untuk bermacam-macam aktivitas oleh anggota rumah tangga juga harus diperkirakan pengeluaran untuk masing-masing kegiatan tersebut terhadap sumbangan yang diberikan.

Pengeluaran pegawai yang merupakan biaya antara bagi perusahaan, walaupun akan mengurangi gaji pegawai tersebut, tidak dianggap sebagai konsumsi rumah tangga. Misalnya pembelian alat-alat kerja seperti lampu senter, bahan peledak, dan lain-lain oleh buruh tambang untuk melakukan pekerjaannya. Ada dua jenis konsep yang dipakai dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada wilayah domestik suatu region.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada rumahtangga penduduk suatu region.

Pengertian konsep pertama adalah pengeluaran oleh anggota rumah tangga di suatu region, tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk region tersebut. Jadi dalam hal ini semua pengeluaran oleh anggota rumah tangga staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain yang berada di suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing adalah

to the respective activities. As same as expend of rent ; fuel, electricity, running water, and other service used for many activities done by member of the family must also be counted the expenditure for each activity with contribution given.

Employees expenditure as intermediate cost for the industry, although will less the employee's wages, can not be considered as private consumption. For example, the purchasing of equipment such as flashlight, explosive and so on by ferryman to do his work. There are two kinds of concept used in counting expenditure of private consumption :

1. *Private consumption expenditure, limited in the domestic district of region.*
2. *Private consumption expenditure, limited in the resident household of region.*

The first concept is expenditure of the member of family in a region, by the population in the region. So, all expenditures by private member of the staff in foreign ambassador, staff of region deputy, military member and the others in the region, also expenditure of foreign tourists are the private consumption expenditure in domestic region. The meaning of the second concept is private

pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam wilayah domestik region tersebut. Sedangkan yang dimaksud dalam konsep yang kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah domestik di tambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar region, dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang dilakukan di wilayah domestik.

Pengeluaran rumah tangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor, tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga, karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan.

Konsep pengeluaran rumah tangga yang dipakai dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto adalah pengeluaran konsumsi penduduk.

2.2 Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung (Nirlaba)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas/tak terpakai.

consumption expenditure in domestic region. The meaning of the second concept is private consumption expenditure in domestic region added by the direct purchasing by private of resident outside the region leased by the private expenditure of unpopulation done in the domestic region.

Private expenditure of official tour paid by industry or office is excluded from the private consumption. They are intermediate costs from industry or office concerned.

Private expenditure concept which is used in Gross Regional Domestic Product's component is the population private consumption expenditure.

2.2 Private Non profit Institution Consumption expenditure

Private Non profit institutions are private institutions which their operations are not based on profit seeking as their objective. Private Non profit Institution Consumption Expenditure covers all expenditure for the purchasing of goods and services, receipts from transfer of goods and services, payment of wages and salaries, depreciations, and net indirect taxes deducted by net sales (selling minus purchasing) of second hand goods/wastes.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat seperti : organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan kegiatan tersebut tidak mencari untung.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung mungkin saja mempunyai badan hukum dan mungkin tidak. Lembaga/badan swasta yang tidak mencari untung yang masalah keuntungannya dan pengawasannya sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah dan merupakan bagian kegiatan dari pemerintah, tidak termasuk dalam lembaga swasta yang dimaksud ini.

2.3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan

Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertahanan adalah sama dengan nilai jasa yang dihasilkan untuk keperluan sendiri. Nilai dari jasa ini adalah sebesar nilai produksi bruto dikurangi dengan jumlah penjualan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi tingkat propinsi, kabupaten, dan tingkat desa. Sedangkan pemerintah pusat mencakup semua Badan/Lembaga Tinggi Negara, Departemen dan unsur Departemen, serta instansi lain beserta

Private Non profit institutions consist of private institutions/agencies providing services to community, such as: labor unions, associations of experts/professionals, religious agencies, research institutions, red cross and orphanages, which are non-profit making.

These private non profit institutions cover both the form of legal entities or non legal entities. If fully or a large part of them were managed by the government, they do not belong to this category, but included in the Government.

2.3 Government and Defense Consumption

Consumption of government and defense expenditure are same with service value produced for own consumption. Value of the service as big as value of product deducted by selling goods and service that can not be separated with government activity. Government activity includes government administration in central and district, so are defense and security administration. Region government includes province, regency, and village. Whereas, central government include all of department with other institution with the spreading in the regency as vertical institution office. The activities done by state's industries such as: Perum, Perjan, PT (Persero, PN) and

jajarannya di daerah sebagai dinas instansi vertikal. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan milik negara seperti : Perum, Perjan, PT (Persero , PN) dan lainnya, karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Kegiatan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai seperti : melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijaksanaan perekonomian negara, dan lainnya. Dengan demikian kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Untuk memperoleh besarnya nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri secara langsung tidak mungkin karena produksi sektor ini tidak ada/tidak dijual. Oleh karena itu untuk dapat memperkirakan besarnya nilai produksi yang dikonsumsi sendiri dilakukan dengan cara menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Biaya yang dimaksud adalah :

1. Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai sebagai balas jasa yang diberikan. Untuk selanjutnya disebut sebagai belanja pegawai, dimana pegawai di sini mencakup pegawai pemerintah pusat dan pegawai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer.
2. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi,

so on are excluded, because these activities have included in sector connected or each work possibilities.

Government activities prepare public service which uncountable economically, such as: doing government administration, keeping the stability and security of state, increasing the education and health of public, arranging other state economical policy. This government activity is different from other economic activities.

In order to get value of goods and services to own consumption, directly method is not possible, because there is no production value to own consumption is done by calculating the production cost. The cost cover :

1. *Government expenditure which is used to pay fee and employee's salary as repaired the service given. This expenditure, then we called as employee purchase; consist of central government staff and regency government staff, both civilian and military.*
2. *Government expenditure which is used to purchase goods and services finished on production process, it*

selanjutnya disebut belanja barang. Dalam belanja barang di sini, termasuk juga belanja perjalanan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas, dan pengeluaran rutin lainnya. Pembelian terhadap barang-barang modal tidak termasuk di sini, kecuali pembelian barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang-barang strategis seperti bahan pangan dan bahan bakar tidak dimasukkan dalam pengeluaran konsumsi pemerintah, akan tetapi dimasukkan sebagai stok.

3. Pengeluaran penyusutan barang-barang modal pemerintah. Besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja pegawai.

Apabila ketiga macam pengeluaran konsumsi pemerintah dijumlahkan, maka hasilnya merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah.

Hasil penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat, baik yang pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau kemungkinan dibayar di bawah harga pokok, maupun penerimaan penjualan hasil produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan sebagai unit industri (hasil penjualan karcis masuk gedung museum, gedung kesenian, kebun binatang yang dikelola oleh pemerintah), penjualan buku publikasi, bibit pertanian, dan sebagainya.

called goods purchasing. Purchasing goods cover purchasing official transportation, repairing office and official house, and other routine expenditure. Purchasing the capital goods is excluded, except purchasing goods for defense and security need. Government expenditure which is used to prepare strategic goods as food stuff burner are excluded from government consumption expenditure, but included in stock.

3. *Depreciation of government capital goods. In order to calculate depreciation value, we use certain percentage to employee purchase.*

If the three kinds of expenditure above are added and then leased by the result of selling goods and government service, the result is called as government consumption expenditure.

Income of selling goods and services include receiving goods and services sold by government to public, either not profit or may be paid below the basic prices, and so receiving of government product income which can not be separated as unit of industry (ticket income of museum, art, zoo, which are managed by government), selling of publication book, seed, and so on.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengertian konsep pembentukan modal tetap bruto dalam suatu region adalah semua barang modal baru yang digunakan atau dipakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu region. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar region, ataupun dari pengadaan dalam region itu sendiri.

Jenis barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun atau lebih, dan yang dimaksud pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi. Barang-barang yang diproduksi kembali seperti tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Selanjutnya pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan, dan lain-lain serta untuk perluasan areal pertambangan, semuanya adalah merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Jadi pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, tidak termasuk kategori

2.4 Gross Domestic Fixed Capital Formation

The meaning of gross domestic fixed capital formation concept in a region is all new capital goods which are used for production process in a region.

Generally, a kind of good classified into capital good, if it is used as permanent equipment in the process of production and have expected life time of one or year or more. Reproduction goods such as: land, mineral reserve is excluded of forming of gross domestic fixed capital. Further, expends for increasing land function as opening forest to be estate's area, residence, dam, And also the widening of mining area, all are expends for gross domestic fixed capital formation.

Expend for repairing capital goods, which will increase the life use increase production capacity of those capital goods also as expend of gross domestic fixed capital formation. So, the routine expends, as buying goods finished in production process, is excluded from category of gross domestic fixed capital formation. Net selling of second – hand capital goods and rest capital goods from the region, also excluded the forming of

pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran dari dalam region, juga tidak termasuk pembentukan modal tetap bruto, karena barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada pertama kali dibeli. Lain halnya dengan barang modal bekas yang dibeli dari luar region adalah merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena di dalam region barang tersebut belum pernah dihitung.

Pembelian atau pembuatan barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer, seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, persenjataan, bangunan dan barang-barang pertahanan lainnya, tidak termasuk pembentukan modal, karena bersifat konsumtif. Pembentukan modal tetap bruto mencakup :

1. Pembentukan modal tetap di sektor bangunan yang terdiri atas :
 - a. Bangunan tempat tinggal
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar televisi, bandar udara, pelabuhan laut/sungai, jaringan pipa untuk minyak, gas, air dan lain-lain
2. Pembentukan modal tetap dalam mesin dan alat-alat perlengkapan yang terdiri atas :
 - a. Alat-alat transport, seperti kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, truk, dan lain-lain.
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri , listrik, dan pertambangan.
 - c. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian.

gross domestic fixed capital, because those things had been counted as capital material on the first purchase. Trace capital goods bought from outside region are forming of gross domestic fixed capital, because in the region such goods had not been calculated yet.

Purchasing or making durable goods for military supply purpose such as: defense goods, tank, weapons, building and other defending goods, are excluded of capital formation, because consumptively. Gross domestic fixed capital formation covered:

1. *Fixed capital formation of building sector are:*
 - a. *Resident building*
 - b. *Non resident building*
 - c. *Building or other construction as road, bridge, irrigation, electric generator, television broadcaster, airport, sea harbor/river harbor, pipes fabric for petrol, gas, running water and so on.*
2. *Fixed capital formation on machineries and equipments, are :*
 - a. *Transportation equipment as ship, plain, train, bus, truck, and so on.*
 - b. *Machineries and equipment for industry, electricity, and mine.*
 - c. *Machineries and equipments for farming.*
 - d. *Machineries and equipments for bridge making, road, and so on.*

- d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jembatan, jalan, dan lain-lain.
 - e. Mesin-mesin dan perabot untuk keperluan kantor, toko, hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lain.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras.
Pengertian/konsep tanaman keras disini adalah bermacam-macam tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan pemerintah/perusahaan.
 4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya atau untuk dipakai tenaganya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
 5. Margin pedagang atau makelar, service charge dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak perusahaan hutan, hak paten, hak cipta termasuk dalam pembentukan modal tetap.
- e. *Machineries and equipments for office, shop, hotel, restaurant, hospital, and so on.*
3. *Estate widening and new plantation for perennial plant.
Perennial plant is many kinds of plants which the product will be got after one year older more. Included here the expends done by big estate along as the estate does not bring the product yet and replanting by government/industry.*
 4. *Increasing cattle, cared especially for the milk, the wool, or took the power, except cattle kept for slaughter.*
 5. *Trade margin or broker, service charge and charge of owner transfer in selling land transaction, mineral source, forest exertion authority, patent authority, copyright are included in the gross domestic fixed capital formation.*

Dalam hal bangunan atau konstruksi yang karena jangka waktu penyelesaiannya ada yang lebih dari satu tahun, sehingga bangunan tersebut pada waktu penghitungan pembentukan modal masih dalam pengerjaan (belum selesai seluruhnya), maka yang harus diperhitungkan adalah bagian yang sudah selesai saja dari bangunan tersebut dengan memperkirakan nilainya.

About building or construction because the finishing time may be more than one year, if the building does not finish yet, the calculation of fixed capital formation is the finishes part of the building only, that is by calculation the value of the finishing part of building. Machineries and equipments in the making process are excluded in the gross domestic fixed capital formation, but as

Perkiraan nilai dari bangunan yang sudah selesai ini, adalah merupakan pembentukan modal tetap pada tahun tersebut. Sebaliknya mengenai mesin-mesin dan alat-alat perlengkapannya yang dalam proses pembuatan, tidak termasuk dalam penghitungan modal tetap bruto, akan tetapi merupakan stok dari produsennya.

2.5 Perubahan Stok

Pengertian stok disini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses.

Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis seperti bahan pangan yang akan dikeluarkan ke pasaran pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan.

2.6 Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa masyarakat suatu region dengan masyarakat region lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa asuransi, dan berbagai jasa

stock of industry.

2.5 Change in Stock

The meaning of change in stock is the supply of goods at the end of the year, not only from the purchasing going to be used as input on the economic activity or to be sold again, but also goods produced by production units have not been sold yet, and the finishing good or the processing good.

Government is one of strategic needs stock holder like food which are going to be brought to market on crisis time. Other stock holder is producer and trader. Generally, stock at producer is the raw materials, goods or tools produced, but still in processing or goods which are not sold yet.

2.6 Export and Import

Export and import cover transaction of goods and services between populations of different region (include between one region with population abroad). This transaction covers export and import of goods, transportation services, communication

lainnya seperti : jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang region tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestik yang dilakukan oleh bukan penduduk region tersebut.

Transaksi barang dan jasa dimaksud adalah semua barang dan jasa yang meliputi batas geografis suatu region atau negara, termasuk daerah pabean dan daerah bebas pajak. Penjualan dan pembelian pesawat terbang dan kapal laut, baik yang baru maupun yang bekas, ke atau dari suatu negara atau region lain, adalah merupakan kegiatan ekspor dan impor barang. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu region, akan tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju ke suatu tempat misalnya barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, sampel barang, barang-barang milik turis atau penumpang tidak termasuk kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau region dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal pengangkap ikan milik penduduk atau region kepada kapal asing atau region lain, adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor.

services, insurance, and other services like trade service received by trader of the region which the transaction activity of goods and services directly bought in the domestic market done by population of other region.

Transaction of goods and services consist of all goods and service inclusive of geographic limits of a region or country, customhouse, and free tax region. Selling and purchasing of plane and ship, new or trace, to or from a country or other region are export and import activities. Material which passing through geographic limit of a region, but only as resting place on the way to some other place like example goods for exhibition, research, tourist's goods are excluded of export and import activity. Navigation or fly needs which be bought during landing in abroad or region and fish directly sold by fishing ship of the population or region to foreign ship or other region, are treated as transaction goods and services which must be included in export and import.

BAB

3

<http://yogyakarta.bps.go.id>

III. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

III. ESTIMATION METHODS AND DATA SOURCES

3.1. Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil pengolahan Badan Pusat Statistik untuk nilai konsumsi. Sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi diperoleh dari hasil pengolahan Badan Pusat statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil SUSENAS, diperoleh rata-rata konsumsi per kapita per minggu untuk bahan makanan dan rata-rata nilai konsumsi per kapita per bulan untuk non makanan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan dengan cara konsumsi per kapita per minggu dikalikan tiga puluh dibagi tujuh. Nilai konsumsi bahan makanan dan bukan makanan setahun diperoleh dengan cara nilai konsumsi per kapita per bulan dikali dua belas dikalikan jumlah penduduk pertengahan tahun (angka proyeksi).

Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga untuk tahun yang tidak tersedia, data SUSENAS dengan menggunakan koefisien elastisitas permintaan terhadap pendapatan untuk kelompok konsumsi makanan dan kelompok pengeluaran non makanan. Untuk kelompok makanan nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai konsumsi dalam satuan kuantum dengan

3.1 Private Consumption

The main data source to estimate private consumption is the result of the National Social Economic Survey (SUSENAS) in D.I. Yogyakarta Province processed by BPS-Statistics for consumption amount. Whereas, the price of each commodity consumed is obtained from the work processing result by BPS-Statistics of D.I. Yogyakarta Province.

From the result of SUSENAS, we got the average of consumption per capita each week for food and value average of consumption per capita each week for food and value average of consumption per capita each month for non food. In order to get a monthly food consumption value is by multiplying the weekly per capita by 30 then divided by seven. Consumption value of food and nonfood for a year is obtained by multiplying the monthly of consumption value per capita by twelve and multiplied by amount of middle year population (the projection figure).

The estimation of private consumption value for the years there are no surveys, we use elasticity demand of income. The computation of private consumption expenditure for every food items at current price is obtained by multiplying the quantity by consumer price (real price). Likewise, the computation at constant price is obtained by revaluation method, namely by multiplying the

harga konsumen atau harga eceran. Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar PDRB.

Nilai konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara deflasi, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan indeks Harga Konsumsi (IHK) yang sesuai.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman yang dikonsumsi di luar rumah.

3.2. Konsumsi Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)

Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan survei khusus lembaga non profit. Sektor jasa ini meliputi jasa lembaga non rumah tangga yang dikategorikan sebagai lembaga swasta yang tidak mencari untung seperti kegiatan panti asuhan dan tempat ibadah. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti dokter praktek, bidan/dukun bayi dan tukang gigi tidak dimasukkan.

Dari hasil penghitungan Nilai Produksi Bruto menurut lapangan usaha, diperoleh perkiraan nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, baik atas dasar berlaku dan harga konstan.

quantum by unit price of GRDP base year.

Private consumption value for no food at constant prices is obtained by deflation method. This method is by dividing of consumption at current market prices by the appropriate of Consumer Price Index (CPI).

This private consumption expense had been completed by the amount of food/drink consumption consumed outside home.

3.2 Private Non-profit Institution Consumption Expenditure

The estimation of private non-profit institution consumption is obtained from the special survey of private non profit institutions. This sector covers public social service which classified into private non profit institution such as orphanages and religious worship facility. The other activities such as practice's doctor, midwife, and dental technician are excluded.

From the computation of gross production value by sectoral, we get an estimation of non profit private institution consumption expenditure, both at current prices and at constant prices.

3.3 Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan

Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara sedangkan untuk pengeluaran pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3.

Kalau diteliti dari pengeluaran pemerintah, terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebnagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang, dan pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan yang lainnya tidak dimasukkan karena pengeluaran disini merupakan transfer.

Dari kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengeluaran pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah. Pengeluaran di sini biasanya disusun menurut tahun fiskal.

3.3 Government and Defense Consumption

The data purchasing of employee goods, and other routine expenditures are obtained from realized of central government expenditure and local government expenditure. Expenditure of central government expenditure. Expenditure of central government is obtained from State Finance Office, while expenditure of local government in this case include province, regency/city, and village government are collected using forms of K1, K2, and K3.

Government expenditure covers routine and development expenditures. Routine expenditure consists of employee purchase, goods purchase, subsidy, and other expenditures. From group of routine expenditure, we record employee's purchase, goods purchase, and other routine expenditure as government consumption expenditure. While, the others are excluded because these expenditure are transfer.

The group of development expenditure where the main aim is for physical increasing in every department, we record it as government investment. But, the routinely cost, such as research expenditure and science development expenditure, are included as government consumption. Usually, these expenditures are planned regulation of the fiscal year.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ditinjau dari sudut pemilikan, pembentukan modal tetap bruto dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha (sektor). Sedangkan kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang.

Perkiraan pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga yang berlaku, diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai tambah bruto sektor konstruksi/bangunan.

Perkiraan nilai pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga konstan, diperoleh dengan cara mendeflate nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga perdagangan besar impor, dan dengan indeks harga perdagangan besar sektor industri untuk barang modal antar pulau.

3.5 Perubahan Stok

Perubahan stok dalam suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat

3.4 *Gross Domestic Fixed Capital Formation*

The meaning of gross domestic fixed capital formation concept in a region is all new capital goods which are used for production process in a region. Looked from ownership point, gross fixed capital formation can be calculated based on expenditure of purchasing capital goods by each sector of GRDP. But, from the own capital goods, the capital formation can be calculated based on the flow of goods.

Estimation of gross fixed capital formation at current market prices is obtained by counting the capital goods value come into region and capital goods come from other regions or island, plus the certain percentage of gross production of construction sector.

Estimation of gross fixed capital formation at constant prices, got by deflate the gross fixed capital formation at current market prices with wholesale price index of goods import, and with wholesale price index of industry sector for goods capital between island.

3.5 *Change in Stock*

Change in stock in certain year is obtained from all stock value at the end of the year leased by all stock value at the end of the year before (at the beginning of the recent year). Estimation of change in stock can be done by two methods :

dilakukan dengan dua metode yakni :

1. Metode Langsung

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan dari hasil survei tahunan diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Yaitu dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini mungkin tersedia hanya untuk beberapa beberapa jenis barang. Oleh karena itu maka komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung secara sektoral dikurangi dengan komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

Perubahan stok penghitungannya ditaksir sebagai residual karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan perubahan stok. Dengan demikian stok merupakan sisa, yaitu PRDB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor netto (ekspor-impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

1. Direct Method

Value of stock is obtained from each activity and kind of goods assembled through census and survey. Based on trade financial balance report from the result of yearly survey, we get stock value at the beginning and the end of the year. After that, we calculate with average market prices of the year period.

2. Indirect Method (Flow of Goods Method)

Value of stock is obtained by counting the beginning and the end of stock from each kind of goods. So far, there are hardly any data on this way. Therefore this component is estimated based on residual method, namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) by industrial origin leased by the other components which have calculated by reserved data.

The calculation of change in stock is estimated as residual, because there are not available data. Like this, stock is treated as balancing. It is GRDP by industrial origin leased by the private consumption, private non profit institution's consumption, government consumption, gross fixed capital formation, and net export (export leased by import), both at current prices and at constant prices.

3.6. Ekspor dan Impor

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor ditingkat region masih sangat terbatas. Ekspor dan impor ditingkat region ini meliputi : transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau atau antar propinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku.

Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan dengan cara sebagai berikut : nilai ekspor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar umum ekspor tanpa minyak, dan nilai impor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar umum kelompok impor.

Nilai barang yang ke luar antar pulau atau antar region atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mendeflate masing-masing dengan IHPB umum

Data ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan dari Departemen Perdagangan. Sedangkan untuk barang yang keluar dan masuk antar pulau/propinsi diperoleh dengan cara menghitung selisih produksi domestik dengan konsumsi domestik. Konsumsi domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi industri.

3.6 Export and Import

Reserved data of export and import in region level were still limited. Export and import in region level include direct transaction with abroad, sea transportation or trans provincial. From export and import, both abroad and between regions in each year, we get value of export and import at current prices.

In order to get export value at constant prices is by this way: deflated the export value by general wholesale price index of export without petroleum oil, and deflated import value by general wholesale price index of import group.

Value of goods going out by sea transportation or trans region based on 1993 constant prices is obtained by deflating everything by general wholesale price index.

The data about abroad export and import is obtained from yearly statistical of export and import publicized by Ministry of Trade. While for goods out and in trans provincial got by counting the difference of domestic product with domestic consumption. Domestic consumption consists of private and industries consumption.

BAB

4

<http://yoogyakarta.bps.go.id>

IV. TINJAUAN PDRB DARI PENDEKATAN PENGGUNAAN

IV. REVIEW OF GRDP BY EXPENDITURE

Untuk mengkaji sisi pengeluaran PDRB akan dibahas terlebih dahulu mengenai peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian. Di dalam ekonomi sebagai satu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok yakni (Nellis dan Parker, 2002) :

1. Rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba)
2. Pemerintah
3. Korporasi
4. Jasa keuangan
5. Kelompok luar daerah /luar negeri.

Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi, dimana antar satu institusi dengan yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, rumah tangga menyediakan sumber daya berupa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi tersebut dapat berupa tenaga kerja, tanah dan modal. Sebagai balas jasanya, rumah tangga menerima pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa dan bunga serta keuntungan (profit dan dividen).

Berbeda dengan peran Rumah tangga, korporasi memperkerjakan dan memberi balas jasa atas faktor yang disediakan oleh rumah tangga. Tugas korporasi adalah memproduksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga, pemerintah, korporasi lain

To evaluate the GRDP by expenditure, the first will explain the role of economic agents to drive the economic activities. Within the economy as a whole, economic agents may be aggregated into one of five groups or sector :

1. *the household sector*
2. *the firm sector*
3. *the government sector*
4. *the financial services sector*
5. *the foreign sector*

Each sectors above play the role which relationship of intersectors can be divided by function and behavior in economy system.

At the most basic level, households provide the resources (factors of production) that firms need to produce goods and services. These resources take the form of labor, land and capital. In return, households receive from firms payment for these factor services in form of wages and salaries, rents and interest, profits and dividends.

In contrast to the household sector, firms employ and reward the factors of production provided by households. The employment of these resources give rises to many different type of goods and services which are then bought by households, the government, other firms

dan pasar luar daerah/luar negeri. Korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi dalam pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan serta kapasitas produksi lainnya.

Seperti halnya korporasi, Pemerintah memainkan berbagai peran dalam perekonomian seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kegiatan lainnya. Kemudian Pemerintah memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang juga merupakan bagian dari kelompok rumahtangga. Untuk memenuhi konsumsinya, Pemerintah memerlukan barang dan jasa konsumsi akhir dari perusahaan. Dibidang pembentukan modal Pemerintah juga mengeluarkan dana melalui pembangunan jalan baru, bangunan untuk sarana umum seperti rumah sakit, sekolah. Pada akhirnya, pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Kelompok jasa keuangan berperan menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Institusi ini tidak memproduksi output secara fisik sehingga mereka biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi. Peran kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani antara penabung dan peminjam. Penabung bisa berasal dari rumahtangga, korporasi, pihak asing dan badan-badan lainnya yang melayani publik.

and foreigners. Firms also perform a vital role in the economy in the form of investment in new plant and machinery, land and buildings and other productive capacity.

Like firms governments perform a number of functions within economies such as providers of health services, education, defense and law and order. Then they pay wages to their employees who form part of the household sector. To fulfill their expenditure, the government purchases the final goods and services of firms. Lastly, governments collect taxes from individuals and companies to finance their expenditure, including making transfer payments to the unemployed in form of direct or indirect subsidies.

The financial services sector play the role as financial intermediaries like as bank, insurance companies, pension funds, etc. This institutions do not produce any physical output therefore they are usually grouped separately from other firms. They perform a vital role to link between savers and borrowers. Savers are households, firms with surplus funds, foreigners and public bodies.

Adapun kelompok luar daerah/negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal transaksi ekspor dan impor baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan luar negeri. Selanjutnya, meningkatnya ketergantungan antar daerah/negara karena dampak globalisasi, perlunya arus investasi dari luar cenderung meningkat. Arus modal ini berperan menutup kekurangan tabungan domestik untuk pembiayaan investasi dan belanja konsumsi yang diperlukan penduduk.

4.1. Struktur PDRB Penggunaan

4.1.1 Konsumsi Rumahtangga

Konsumsi rumahtangga menghabiskan sekitar Rp12,51 triliun dari total nilai PDRB pada tahun 2005 yang sebesar Rp25,42 triliun atau mencapai sekitar 49,23 persen. Persentase ini cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2001 persentasenya sekitar 54,39 persen dan menjadi 50,46 pada tahun 2004. Relatif tingginya persentase Konsumsi Rumahtangga dalam PDRB mengisyaratkan bahwa komponen ini secara relatif berdampak besar untuk menggerakkan perekonomian.

Dilihat menurut jenisnya, mulai tahun 2003 persentase non makanan telah lebih besar dari konsumsi makanan, dengan perbandingan masing-masing 23,65 dan 25,59 persen pada tahun 2005. Karakteristik seperti ini umumnya ditemui pada masyarakat perkotaan dimana konsumsi non makanan mendominasi pengeluaran rumahtangga seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk. Hukum Engel menyatakan bahwa dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maka porsi

Foreigners make a direct contribution to the economy by buying exports and selling import. Moreover, with increasingly interdependent regions/countries, the importance of foreign capital flows plays an important role alongside domestic savings in financing investment and consumer spending in economies.

4.1. Structure of GRDP by Expenditure

4.1.1. Private Consumption

Private consumption has spent by 12.51 quintillion rupiah of total value of GRDP 25.42 quintillion rupiah in 2005 or its share reached 49.23 percent of total. This figure tends to decrease year by year. In 2001, it took 54.39 percent and down to 50.46 percent in 2004. Higher household expenditure in GRDP describes this component has a dominant effect in economy.

By the kinds, it started in 2003 percentage of non food more than portion of food with the comparative portion of 23.65 and 25.59 percent in 2005. This phenomenon can be met in urban's people, which non food consumption plays a dominant role as long as increasing in prosperous. Engel Laws explained that increase of income will be followed by decrease of portion of food consumption.

makanan akan semakin berkurang.

Kecenderungan makin besarnya porsi konsumsi non makanan dalam konsumsi rumahtangga di DIY terkait dengan dominasi konsumsi penduduk di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang relatif telah mengarah pada pola konsumsi penduduk perkotaan dengan konsumsi non makanan relatif besar. Pola konsumsi rumahtangga menurut kabupaten/kota terlihat pada Tabel 4.1.

Selama tahun 2000-2005 terdapat pergeseran yang cukup signifikan porsi makanan pada rumahtangga di DIY yakni dari 60,11 persen pada tahun 2000 menjadi 46,02 persen pada tahun 2005. Akibatnya porsi konsumsi non makanan naik dari 39,89 persen pada tahun 2000 menjadi 53,98 persen pada tahun 2005, sehingga saat ini kondisi tersebut berbalik dimana porsi non makanan telah melampaui konsumsi makanan.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pola pergeseran yang sama juga terjadi dengan tingkat kecepatan yang berbeda. Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulonprogo tercatat mengalami pengurangan porsi makanan relatif cepat dengan tingkat perubahan mencapai diatas 10 poin selama lima tahun. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami perubahan paling lambat. Kondisi ini terkait dengan tingkat perubahan perkapita yang relatif lebih lambat di kabupaten ini dibandingkan dengan daerah lainnya.

Selanjutnya jika dicermati pola konsumsi kabupaten/kota tahun 2005, terlihat bahwa porsi konsumsi non makanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah lebih tinggi dari

The higher portion of non food consumption was affected by the dominant portion of expenditure of urban's people in Yogyakarta City and Sleman Regency. Their consumption has changed with higher portion in non food expenditure. The pattern of household consumption by city/regency can be shown on Table 4.1.

During 2000-2005, there was a significant change of food consumption from 60.11 percent in 2000 and down to 46.02 percent in 2005. Therefore non food consumption increase from 39.89 percent in 2000 to 53.98 percent in 2005 that shows the portion of non food expenditure bigger than food consumption.

The same pattern also occurs in city and regency in D.I. Yogyakarta Province. Sleman, Bantul and Kulonprogo Regency have the rapid decrease of food expenditure for five year recently. Meanwhile Gunungkidul Regency has a small change in the same period. It's caused by the progress of income per capita in this region that grew slower than the other regions.

Moreover, if we examined the expenditure pattern in city/regency in 2004, showed that proportion of non food consumption in Yogyakarta City and Sleman Regency are greater than food

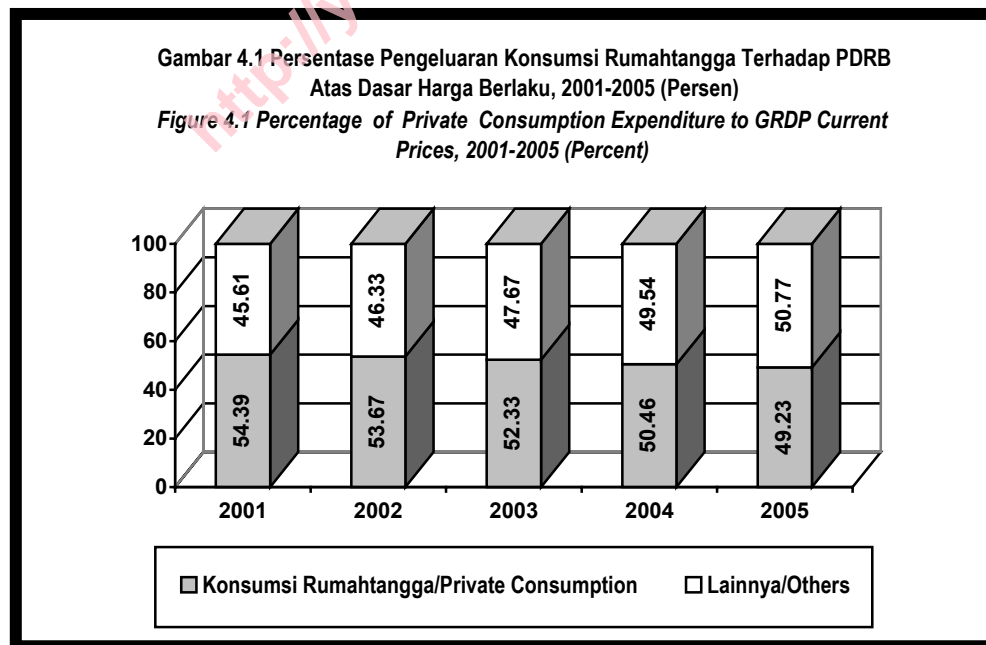
konsumsi makanan. Adapun di Kabupaten Bantul proporsi keduanya relatif sama. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa secara ekonomi daerah-daerah ini lebih sejahtera dibandingkan kabupaten lainnya.

consumption, whereas in Bantul Regency its portion is equal. It indicated they have the better wealth than others.

Tabel 4.1. Pola Konsumsi Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota di Prop. DIY, Tahun 2000 dan 2005 (Persen)
 Table 4.1. Percentage of Household Expenditure by Regency/City and Kind in D.I. Yogyakarta, 2000 and 2005

Kabupaten/Kota Regency/City	2000		2005		Perubahan Persentase Makanan
	Makanan Food	Non Makanan Non Food	Makanan Food	Non Makanan Non Food	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	67,61	32,39	52,39	47,61	15,21
2. Bantul	62,51	37,49	49,44	50,56	13,07
3. Gunungkidul	65,59	34,41	58,56	41,44	7,03
4. Sleman	59,62	40,38	41,62	58,38	18,00
5. Yogyakarta	50,59	49,41	40,86	59,14	9,74
DIY	60,11	39,89	46,02	53,98	14,09

Sumber : Susenas 2000 dan 2005, data diolah
 Source : National Sosio Economic Survey, data processed



4.1.2. Konsumsi Pemerintah

Pemerintah tidak hanya berperan menyusun regulasi untuk mengatur kehidupan bernegara namun juga melaksanakan kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja pemerintah. Dewasa ini peran pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan seperti penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya penduduk berpenghasilan rendah. Kegiatan dimaksud disamping membutuhkan anggaran yang tertuang dalam APBN(D) juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

Konsumsi Pemerintah dalam PDRB tercatat Rp 5,35 trilyun pada tahun 2005 atau andilnya mencapai 21,03 pada tahun tersebut. Selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan meningkatnya Konsumsi Pemerintah dari 18,74 persen pada tahun 2001 menjadi 20,22 persen pada tahun 2004. Gejala ini menunjukkan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskal masih cukup dominan dalam menggerakkan perekonomian daerah DIY.

Penelaahan Konsumsi Pemerintah menurut sumber pembiayaan, terlihat bahwa ketergantungan pada pembiayaan dari alokasi APBN masih cukup besar yakni mencapai 58,12 persen pada tahun 2005. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2000 yang sekitar 76,15 persen. Pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2001 menjadikan kewenangan pemerintah daerah mengelola bantuan keuangan dari

4.1.2 Government Expenditure

The role of government isn't only arranges regulations to order national life but also do the economic activities by government budget. In later this role was needed to accelerate people's prosperity such as financing education, health services and economic empowerment, especially for poor people. These programs need the budget for developing of public facilities in form of regional/national budget, include expense for government's administrative activity. That is named as Government Expenditure.

In 2005, government expenditure is 5.35 quintillion rupiahs or its sharing reached 21.03 percent. For 5 years later it tends to increase from 18.74 percent in 2001 to 20.22 percent in 2004. This phenomenon showed that the role of government still dominated to drive the economies in form fiscal policy.

If we examine further government expenditure by source of budget, show that it was still depended by national budget with share by 58.12 percent in 2005. Compare to previous years this dependency has decreased with its share around 76.15 percent in 2000. Implementation of regional autonomous since 2001 improve the responsibilities of local government to manage the finance that sourced from Central government thorough the instrument such as General

Pemerintah Pusat menjadi lebih besar seperti melalui instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi. Secara berangsur, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola APBD yang makin besar, sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat memilih prioritas kebijakan fiskal yang ingin dilaksanakan.

Ditinjau berdasarkan alokasinya, sebagian besar konsumsi Pemerintah dihabiskan untuk belanja pegawai yang mencapai 66,43 persen pada tahun 2005, sedangkan selebihnya sebesar 33,57 persen untuk belanja barang.

Selama tahun 2000-2003, terdapat kecenderungan komposisi belanja pegawai cenderung makin mengecil, dimana proporsinya tercatat sebesar 73,44 persen pada tahun 2000 dan turun menjadi 65,82 persen tahun 2003. Akibatnya anggaran untuk belanja barang cenderung makin besar (Tabel 4.3). Namun pada tahun 2004-2005 porsi belanja pegawai kembali membesar karena adanya penerimaan CPNS baru pada beberapa instansi pemerintah di pusat ataupun pemerintah daerah.

Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Deconsentration Fund. The local government has greater the responsibilities gradually therefore they can manage the fiscal policy with their priorities.

Analyzing by allocation, most of government expenditure take to pay personal expenditure that reached 66.43 percent in 2005, and the other for material expenditure.

During 2000-2003, the personal expenditure tend to decrease, which its proportion recorded 73.44 percent in 2000 and down to 65.82 percent in 2003. In the others, material expenditure tends to increase (Table 4.3). In 2004-2005, proportion of employee expenditure increased again, that might cause by the recruitment of new employee can encourage the portion of employee expenditure.

Tabel 4.2. Konsumsi Pemerintah Menurut Sumber Pembiayaan Propinsi D.I. Yogyakarta, 2000 – 2005 (%)
 Table 4.2. Government Expenditure by Source of Finance in D.I Yogyakarta Province, 2000-2005 (%)

Sumber Pembiayaan Source of Budget	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. APBD Propinsi dan Kab/Kota <i>Regional budget of Province and Regency/City</i>	23,85	33,73	40,74	43,53	45,92	41,88
2. Alokasi Pemerintah Pusat <i>Allocation of national budget</i>	76,15	66,27	59,26	56,47	54,08	58,12
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan K1 dan K2 dan Neraca Pemerintah Pusat
 Source : Result of processing of K1 and K2 Form and Central Government Account

Tabel 4.3. Konsumsi Pemerintah Menurut Jenis Pembiayaan di Propinsi D.I. Yogyakarta, 2000 – 2005 (%)
 Table 4.3. Government Expenditure by Allocation in D.I. Yogyakarta Province, 2000-2005 (Percent)

Jenis Pembiayaan Allocation	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Belanja Pegawai <i>Personal Expenditure</i>	73,44	70,90	67,15	65,82	68,21	66,43
2. Belanja Barang <i>Material Expenditure</i>	26,56	29,10	32,85	34,18	31,79	33,57
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan K1 dan K2 dan Neraca Pemerintah Pusat
 Source : Result of processing of K1 and K2 Form and Central Government Account

4.1.3. Investasi

Kesinambungan pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya penanaman modal atau investasi baru. Pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan kegiatan produksi barang dan jasa di seluruh sektor ekonomi dan diperlukan dana untuk membiayai aktivitas tersebut. Karena perannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi maka peningkatan investasi terkait erat dengan peluang penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi diharapkan dapat menciptakan pembukaan lapangan kerja baru bagi penduduk sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

4.1.3. Investment

To keep sustained economic growth needed a new investment. Economic developing requires the fund/investment to encourage the activities of production of goods and services. The role of investment to accelerate the economic growth affect on absorption of workers. Investment was expected creating a number of new employments for people to grow up their prosperous.

Dalam buku *A System of National Account (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan PMTB dan perubahan stok. PMTB menggambarkan investasi domestik fisik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif. Sedangkan stok (*inventory*) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, dapat berbentuk barang setengah jadi, atau bahkan input yang belum digunakan, dan stok barang jadi yang belum terjual. Dari konsep tersebut dikenal dua pendekatan yaitu pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro memperkirakan bahwa investasi identik dengan PMTB, sedangkan pendekatan makro identik dengan PMTB ditambah perubahan stok.

Dengan menggunakan pendekatan mikro, diketahui bahwa nilai investasi di DIY pada tahun 2005 sekitar Rp7,7 triliun atau naik sekitar 21,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,34 triliun. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan investasi di DIY cukup pesat yang didorong oleh tingginya perkembangan sektor Bangunan. Sumber pembiayaan diperkirakan sebagian besar berasal dari luar DIY mengingat permintaan sektor Bangunan banyak dilakukan oleh penduduk dari luar DIY. Demikian pula untuk investasi pembangunan pusat-pusat perbelanjaan diperkirakan dana berasal langsung dari investor luar DIY.

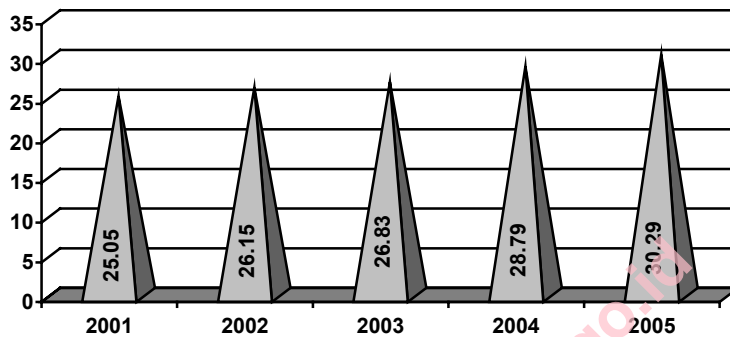
Dilihat komposisinya dalam PDRB, sumbangan investasi terhadap PDRB tercatat 25,05 persen tahun 2001 dan masing-masing naik menjadi 26,83 dan 30,29 persen pada tahun 2003 dan 2005.

In A System of National Account published by United Nations, it was explained that realization of investment in a region equal with Gross Domestic Fixed Capital Formation (GDFCF) added by inventory. GDFCF represent physical domestic investment that realized in a certain year in cumulative. Whereas inventory represents output of a sector that not completely processed, in form semi finished product or raw material Based on this concept there are two approaches to estimate investment. By macro approach investment was calculated by adding of GDFCF and inventory. Whereas, by micro approach investment is equal to GDFCF.

Refer to micro approach, investment recorded 7.7 quintillion rupiah in 2005; go up by 21.46 percent compared to previous year that is 6.34 quintillion rupiah. Recently five years, the progress of investment was supported by rapid growth of Construction sector. Source of this investment probably come from non resident because they have a high demand for residential building. Investment in business building has a same pattern.

Share of investment to total GRDP is around 25.05 percent in 2001 and grew sharply by 26.83 and 30.29 percent in 2003 and 2005 respectively.

Gambar 4.2 Andil PMTB Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ,
2001-2005 (Persen)
Figure 4.2 The Contribution of Investment to GRDP at Current Prices, 2001-2005
(Percent)



Untuk melihat efisiensi penanaman modal di suatu wilayah, ukuran yang biasa digunakan adalah ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan penambahan output dalam periode tertentu. Dalam tulisan ini indikator ICVAR yang dihitung adalah konsep ICVAR dengan lag 0, artinya bahwa investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga.

ICVAR Propinsi DIY selama 2001-2005 mencatat nilai sekitar 6 dengan kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2001, nilai ICVAR tercatat 5,96 dan naik menjadi masing-masing 6,22 dan 6,27 pada tahun 2003 dan 2005. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi 6,27 persen pada tahun 2005. Nilai ICVAR ini termasuk dalam kategori tidak efisien karena menurut Widodo (1990) angka ICVAR yang memiliki produktivitas investasi yang baik berkisar antara 3-4.

To evaluate the efficiency of investment in certain region, it is usually used the *Incremental Capital-Value Added Ratio (ICVAR)*. This indicator is ratio of value of investment and growth of output. This paper present ICVAR with zero lag that mean a new investment has impact to economic growth in the same year.

The value of ICVAR during 2001-2005 tends to increase that recorded 5.96 in 2001 and increase to 6.22 and 6.27 in 2003 and 2005 respectively. It showed that to reach one percent of economic growth required a new investment by 6.27 percent in 2005. This result indicated investment in D.I Yogyakarta is not efficient, because the high productive investment has value of ICVAR in range 3-4.

Tabel 4.4. Nilai investasi dan ICVAR di Propinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2000 – 2005
 Table 4.4. Value of Investment and ICVAR in D.I. Yogyakarta Province, 2000-2005

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Investasi - <i>Investment</i>	3.350.117	3.814.187	4.582.332	5.261.514	6.339.875	7.700.699
2. Andil investasi thd PDRB (%) <i>Share to GRDP (%)</i>	24,85	25,05	26,15	26,83	28,79	30,29
3. ICVAR (lag 0)	-	5,96	6,07	6,22	5,93	6,27

Sumber : BPS Propinsi D.I. Yogyakarta, data diolah

Source : BPS-Statistics of D.I. Yogyakarta Province, data processed

Catatan/Note : Investasi=PMTB/*Investment*=Gross Domestic Fixed Capital Formation

4.1.4. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Propinsi DI Yogyakarta tahun 2005 tercatat sebesar Rp9,81 triliun yang terdiri dari ekspor luar negeri Rp1,38 triliun dan 8,43 triliun untuk ekspor antar propinsi. Posisi DI Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan kota pendidikan menjadikan daerah ini disamping menjadi pasar bagi produk-produk dari daerah lain, juga membuka peluang melakukan upaya ekspor ke luar wilayah.

Ekspor antar propinsi yang dilakukan langsung oleh wisatawan diperkirakan memberi dampak cukup besar bagi perkembangan nilai ekspor. Transaksi dagang yang terjadi antara wisatawan dan pedagang dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik ke daerah-daerah lainnya. Komoditas yang dominan dalam ekspor antar propinsi adalah produk sektor industri, sedangkan dalam ekspor jasa didominasi oleh jasa hotel dan restoran serta jasa angkutan dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan.

Sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap PDRB cenderung menurun dari 41,50 persen pada tahun 2001 menjadi 38,59 persen pada tahun 2005. Penurunan

4.1.4. Export and Import

Value of export recorded 9.81 quintillion rupiah in 2005 that consist of foreign export about 1.38 quintillion rupiah and inter region export by 8.43 quintillion rupiah. As a main tourist destination in Indonesia beside Bali, D.I. Yogyakarta becomes a potential market for some product that related to tourist activities.

Inter region direct export done by tourist has a significant impact to grow export transaction. The link between tourist and merchant will form a network for product marketing to other regions. The product of manufacture has a dominant role in inter region export. Whereas, the export of services was dominated by restaurant and hotel services and also communication and transportation used by tourist.

The contribution of goods and services export to GRDP tends to decrease from 41.50 percent in 2001 to 38.59 percent in 2005. It was caused by

ini disebabkan oleh kecenderungan tidak kompetitifnya produk-produk domestik dibandingkan dengan produk daerah lainnya termasuk produk impor dari luar negeri seperti China. Kondisi tidak kompetitif ini bisa disebabkan oleh meningkatkan biaya bahan baku karena pelaku industri juga banyak mendatangkan bahan baku dari luar DI Yogyakarta. Disamping itu, kenaikan harga BBM dua kali pada tahun 2005 yakni pada bulan Maret dan Oktober menyebabkan naiknya biaya distribusi barang. Fenomena penurunan kinerja sektor Industri Pengolahan dalam beberapa tahun terakhir juga dapat menjadi penyebab turunnya kinerja ekspor, khususnya ekspor antar propinsi.

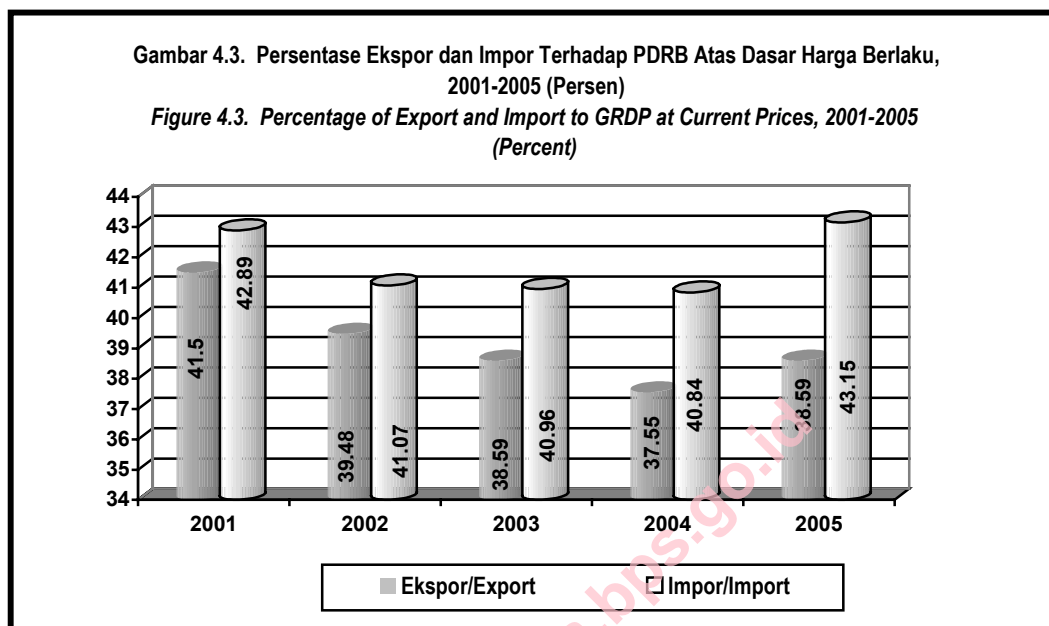
Sementara itu, nilai impor barang dan jasa tahun 2005 tercatat sebesar Rp10,97 triliun, melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama, sehingga nilai ekspor neto Propinsi DI Yogyakarta bertanda negatif yang berarti barang dan jasa yang diimpor lebih besar dari barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah.

Sumbangan impor dalam PDRB bergerak fluktuatif dari 42,89 persen pada tahun 2001 menjadi 40,96 persen pada tahun 2003, naik kembali menjadi sekitar 43,15 persen pada tahun 2005. Disamping untuk memenuhi konsumsi domestik, beberapa komoditas yang diimpor juga digunakan untuk konsumsi para wisatawan baik nusantara dan mancanegara. Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di D.I Yogyakarta sebagian dire-ekspor karena tidak dikonsumsi seluruhnya.

lose of competitiveness of domestic product compare to the foreigner such as the China's industrial products. Moreover, it can be influenced by dependence of raw material from the other regions. Beside that the increase of price of petroleum twice in 2005 in March and October affect the higher of price therefore rising of distribution cost. The low perform of industry manufacture in several years is an answer of the decrease of export, especially inter-region export.

Whereas, the value of import was about 10.97 quintillion rupiah in 2005, was greater than the value of export in the same year, therefore the net export had a negative figure. It indicates that the import of goods and services is greater than the value of export.

The share of import to GRDP moved from 42.89 percent in 2001 to 40.96 percent in 2003 and increased to 43.15 percent in 2005. It indicated the higher of domestic consumption that is dominated by import of final goods, in form of industrial products. Beside for domestic consumption, a lot of import commodities were consumed by both domestic and foreign tourist. This phenomenon explained that not all of import will be consumed, but a part of them were re-exported.



4.2. Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap stakeholder pembangunan baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kebijakan ini merupakan aspek terpenting dalam setiap kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, disamping upaya untuk menekan inflasi, menurunkan angka pengangguran maupun menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2002).

Pertumbuhan komponen PDRB Penggunaan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi terjadi pada komponen PMTB yang mencapai 6,71 persen pada tahun 2005. Selama tiga tahun terakhir komponen ini tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi.

4.2. Economic Growth On The Demand Side

The high and stability of economic growth is a target for all of development stakeholder both government and the other agents. This policy is an interesting issue to arrange credible macroeconomic policies. It must has a synergy link with the effort of controlling rate inflation, reduce unemployment rate and keep the stability of currency and payment balance deficit.

GDFCF is a component of GRDP by expenditure that had rapid growth that is 6.71 percent in 2005. During 3 years recently this component grew over the average of economic growth.

Pertumbuhan konsumsi rumahtangga tahun 2005 tercatat 1,33 persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2004 yang tumbuh sekitar 1,52 persen. Perlambatan ini terkait erat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi DIY dari 5,12 persen tahun 2004 menjadi sebesar 4,74 persen pada tahun 2005.

Untuk komponen Konsumsi pemerintah, selama lima tahun terakhir juga cenderung tumbuh melambat dari 8,03 persen pada tahun 2001 menjadi 3,50 persen tahun 2004 serta naik menjadi 6,12 persen pada tahun 2005. Perubahan struktur pembiayaan pemerintah dalam anggaran belanja negara sejak diterapkan otonomi daerah pada tahun 2001 menunjukkan adanya pertumbuhan yang tinggi dalam Konsumsi Pemerintah di daerah karena adanya pengalihan kewenangan dalam mengelola APEN ke dalam APBD.

Kinerja ekspor selama 2001- 2005 terus menurun dari 11,05 persen pada tahun 2001 menjadi 5,45 persen pada tahun 2005. Menurunnya kinerja pada tahun 2005 disebabkan kecenderungan melambatnya ekspor antar propinsi dalam lima tahun terakhir.

Menurunnya kinerja sektor Industri Pengolahan yang selama ini mendominasi produk-produk ekspor DI Yogyakarta baik ke luar negeri dan daerah lainnya merupakan jawaban sementara atas melemahnya kinerja ekspor tahun 2005. Kenaikan harga BBM sebanyak dua kali selama tahun 2005 diperkirakan akan menyulitkan pelaku industri karena naiknya biaya produksi dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk menggalakkan kembali ekspor pada

The private consumption grew by 1.33 percent in 2005, slower than the previous year by 1.52 percent. The weakness performance related to the deceleration of economic growth from 5.12 percent in 2004 to 4.74 percent in 2005.

Moreover, government consumption during five year recently tends to slow down. In 2001, it grew by 8.03 percent and fell to 3.50 percent in 2004 and returns to 6.12 percent in 2005. The change in government financing structure by applying of regional autonomous since 2001 impacted on faster growth in government consumption because there are transfer of authority in managing both national budget and regional budget.

The performance of export during 2001-2005 tends to decreased from 11.05 percent in 2001 fell sharply to 5.45 percent in 2005. It caused by the lower growth of interregional export for last five years.

The slower of performance of manufacturing sector that dominated the product of export is a tentative answer for decrease of export in 2005. The rising of petroleum price twice in 2005 was estimated making slower and slower the value export because the climbing of production cost and the descent of purchasing power. To attempt again the export value in next years, the local government considers improving manufacturing sector, especially small

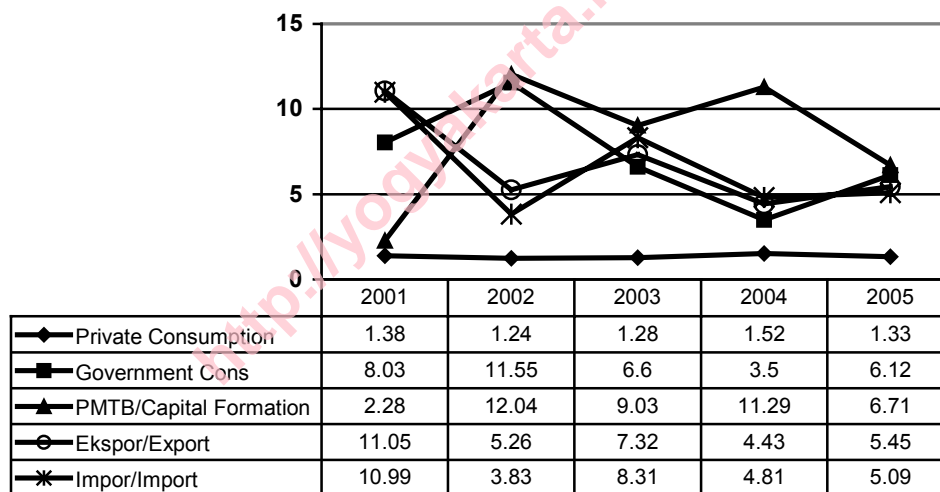
tahun-tahun mendatang diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang memihak pada sektor industri, terutama pada industri UKM.

and medium enterprises.

Berbeda dengan nilai ekspor yang cenderung melemah, kinerja impor relatif berfluktuatif. Produk-produk impor tahun 2005 tumbuh sekitar 5,09 persen yang didorong oleh naiknya impor antar negara sebesar 83,31 persen dan impor antar propinsi sebesar 3,56 persen.

In contrast to the export, the performance of import moved fluctuatively. The products of import grew by 5.09 percent that was stimulated by the growth of foreign import by 83.31 percent and inter region import by 3.56 percent.

Gambar 4.4. Pertumbuhan Komponen PDRB Penggunaan Prop. DIY, 2001-2005 (%)
Figure 4.4. Growth of Components of GRDP by Expenditure, 2001-2005 (Percent)



<http://jemberkota.bps.go.id>

LAMPIRAN
APPENDICES

Tabel 1 / Table 1
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 (Jutaan Rupiah)
Gross Regional Domestic Product at Current Prices
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province , 2001-2005 (Million Rupiahs)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure (1)	Tahun / Year				
	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004* (5)	2005** (6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	8.282.754	9.403.851	10.263.327	11.112.825	12.514.413
a. Makanan <i>Food</i>	4.309.033	4.773.753	5.045.999	5.371.492	6.010.793
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	3.973.721	4.630.098	5.217.328	5.741.332	6.503.621
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	133.185	175.741	228.453	288.741	377.428
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	2.853.218	3.323.913	3.808.536	4.453.900	5.346.768
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	3.814.187	4.582.332	5.261.514	6.339.875	7.700.699
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	358.390	313.136	517.755	553.765	638.527
6. Ekspor <i>Export</i>	6.319.280	6.918.372	7.568.141	8.269.154	9.808.484
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	1.038.066	1.013.611	1.010.766	1.082.509	1.377.492
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	5.281.214	5.904.761	6.557.375	7.186.645	8.430.992
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	6.532.339	7.195.567	8.034.308	8.994.544	10.967.240
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	232.957	106.647	358.614	167.516	360.277
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	6.299.382	7.088.920	7.675.693	8.827.028	10.606.964
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	15.228.675	17.521.778	19.613.418	22.023.717	25.419.079

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 2 / Table 2
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 (Juta Rupiah)
Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Prices
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (Million Rupiahs)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure (1)	Tahun / Year				
	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004* (5)	2005** (6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	7.441.118	7.533.449	7.630.146	7.746.270	7.849.053
a. Makanan <i>Food</i>	3.871.351	3.914.513	3.965.614	4.008.801	4.035.672
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	3.569.767	3.618.936	3.664.532	3.737.469	3.813.382
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	120.494	141.541	169.072	200.935	238.103
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	2.341.529	2.612.062	2.784.581	2.881.993	3.058.447
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	3.426.641	3.839.301	4.186.138	4.658.909	4.971.585
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	601.821	347.844	421.345	506.422	609.330
6. Ekspor <i>Export</i>	5.952.265	6.265.385	6.724.101	7.022.007	7.404.597
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	926.844	929.918	944.641	966.526	1.101.994
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	5.025.420	5.335.467	5.779.459	6.055.481	6.302.603
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	5.828.797	6.052.297	6.554.975	6.870.092	7.220.062
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	204.348	95.221	314.574	131.903	241.796
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	5.624.448	5.957.076	6.240.401	6.738.189	6.978.266
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	14.055.071	14.687.284	15.360.409	16.146.444	16.911.053

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 3 / Table 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 (%)
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Prices
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (Percent)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure (1)	Tahun / Year				
	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004* (5)	2005** (6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	54,39	53,67	52,33	50,46	49,23
a. Makanan <i>Food</i>	28,30	27,24	25,73	24,39	23,65
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	26,09	26,42	26,60	26,07	25,59
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	0,87	1,00	1,16	1,31	1,48
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	18,74	18,97	19,42	20,22	21,03
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	25,05	26,15	26,83	28,79	30,29
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	2,35	1,79	2,64	2,51	2,51
6. Ekspor <i>Export</i>	41,50	39,48	38,59	37,55	38,59
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	6,82	5,78	5,15	4,92	5,42
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	34,68	33,70	33,43	32,63	33,17
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	42,89	41,07	40,96	40,84	43,15
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	1,53	0,61	1,83	0,76	1,42
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	41,37	40,46	39,13	40,08	41,73
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 4 / Table 4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001- 2005 (%)
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Prices
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (Percent)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun / Year				
	2001	2002	2003	2004*	2005**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	52,94	51,29	49,67	47,98	46,41
a. Makanan <i>Food</i>	27,54	26,65	25,82	24,83	23,86
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	25,40	24,64	23,86	23,15	22,55
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	0,86	0,96	1,10	1,24	1,41
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	16,66	17,78	18,13	17,85	18,09
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	24,35	26,14	27,25	28,85	29,40
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	4,28	2,37	2,74	3,14	3,60
6. Ekspor <i>Export</i>	42,35	42,66	43,78	43,49	43,79
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	6,59	6,33	6,15	5,99	6,52
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	35,76	36,33	37,63	37,50	37,27
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	41,47	41,21	42,67	42,55	42,69
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	1,45	0,65	2,05	0,82	1,43
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	40,02	40,56	40,63	41,73	41,26
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 5 / Table 5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001-2005 (%)
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at Current Price
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (Percent)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun / Year				
	2001	2002	2003	2004*	2005**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	12,85	13,54	9,14	8,28	12,61
a. Makanan <i>Food</i>	12,50	10,78	5,70	6,45	11,90
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	13,23	16,52	12,68	10,04	13,28
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	87,23	31,95	29,99	26,39	30,72
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	31,64	16,50	14,58	16,95	20,05
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	13,85	20,14	14,82	20,50	21,46
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	(19,28)	(12,63)	65,34	6,96	15,31
6. Ekspor <i>Export</i>	17,90	9,48	9,39	9,26	18,62
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	27,94	(2,36)	(0,28)	7,10	27,25
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	16,10	11,81	11,05	9,60	17,31
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	24,38	10,15	11,66	11,95	21,93
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	487,85	(54,22)	236,26	(53,29)	115,07
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	20,86	12,53	8,28	15,00	20,16
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	12,97	15,06	11,94	12,29	15,42

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 6 / Table 6

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000
Menurut Penggunaan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 (%)
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Price
by Expenditure in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (Percent)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure (1)	Tahun / Year				
	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004* (5)	2005** (6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	1,38	1,24	1,28	1,52	1,33
a. Makanan <i>Food</i>	1,07	1,11	1,31	1,09	0,67
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	1,72	1,38	1,26	1,99	2,03
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	69,39	17,47	19,45	18,85	18,50
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	8,03	11,55	6,60	3,50	6,12
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	2,28	12,04	9,03	11,29	6,71
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	35,54	(42,20)	21,13	20,19	20,32
6. Ekspor <i>Export</i>	11,05	5,26	7,32	4,43	5,45
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	14,23	0,33	1,58	2,32	14,02
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	10,48	6,17	8,32	4,78	4,08
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	10,99	3,83	8,31	4,81	5,09
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	415,66	(53,40)	230,36	(58,07)	83,31
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	7,91	5,91	4,76	7,98	3,56
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	4,26	4,50	4,58	5,12	4,74

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Tabel 7 / Table 7

Inflasi (Harga Produsen) Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2001-2005 (%)
Inflation Rate (Producer Price) in D.I Yogyakarta Province, 2001-2005 (%)

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun / Year				
	2001	2002	2003	2004*	2005**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga <i>Private consumption expenditure</i>	11,31	12,14	7,76	6,65	11,14
a. Makanan <i>Food</i>	11,31	9,56	4,34	5,30	11,16
b. Bukan Makanan <i>Non Food</i>	11,32	14,93	11,28	7,90	11,02
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba <i>Private non-profit institution's consumption expenditure</i>	10,53	12,33	8,83	6,35	10,31
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah <i>General government consumption expenditure</i>	21,85	4,43	7,48	12,99	13,12
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto <i>Gross domestic fixed capital formation</i>	11,31	7,23	5,31	8,27	13,83
5. Perubahan stok <i>Change in stock</i>	(40,45)	51,17	36,50	(11,01)	(4,17)
6. Ekspor <i>Export</i>	6,17	4,01	1,93	4,63	12,49
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	12,00	(2,68)	(1,83)	4,67	11,61
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	5,09	5,31	2,52	4,60	12,71
7. Dikurangi impor <i>Less import</i>	12,07	6,09	3,09	6,82	16,02
a. Antar negara / luar negeri <i>Abroad</i>	14,00	(1,75)	1,79	11,40	17,32
b. Antar provinsi <i>Trans provincial</i>	12,00	6,25	3,36	6,50	16,03
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	8,35	10,11	7,03	6,82	10,20

*) angka sementara / preliminary figures

**) angka sangat sementara / very preliminary figures

Publikasi ini menyajikan gambaran tentang hasil penyusunan PDRB D.I. Yogyakarta menurut Penggunaan tahun 2001-2005.

Melalui publikasi ini, pembaca akan diantarkan pada pengertian mengenai PDRB menurut penggunaan, serta tinjauan ekonomi Propinsi D.I. Yogyakarta dari sisi permintaan (*demand side*)

BPS

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR), Yogyakarta 55152

Telp. (0274) 387753. Fax. (0274) 375310

E-mail: bps3400@yogya.wasantara.net.id

Homepage: <http://regional.bps.go.id/~yogya>